

Ketika Pancasila dihadapkan dengan berbagai Kesenjangan sosial: Mencari Keadilan Sosial di Tengah Ketimpangan Ekonomi

Muhammad Iqbal, Juan Vito Simanjuntak, Maharani Br Purba, Nurdilla Ramadhani, Risky C Pratama Manullang, Tiara Niammusyfah Pasaribu

Email : m.iqbal@unimed.ac.id, juanvitos.3232421005@mhs.unimed.ac.id,
Purbamaharanipurba@gmail.com, nurdillaramadhani@gmail.com,
pratamamanullang706@gmail.com, tiaraniemmusyfah@gmail.com

Abstract

This article discusses the challenges of Indonesia's yawning social gap, amid increasingly complex economic inequality. Although Pancasila explicitly sets social justice as a lofty ideal, the reality on the ground shows that economic inequality is still a major challenge. This article analyzes the implementation of Pancasila values, particularly the Fifth Precept, in the context of social inequality in Indonesia, and seeks solutions to realize social justice. There is a need for intensive collaboration from the government, private sector, and society to formulate comprehensive structural reform policies. These policies include improving the quality of education, skills training, improving the distribution system of natural resources, and strengthening transparent governance. The goal is to achieve inclusive economic growth, reduce social inequality, and realize national stability. This article also discusses the importance of ensuring every citizen gets equal opportunities in various aspects as a manifestation of the Fifth Precept of Pancasila. This can be achieved through policies that focus on equal distribution and income, improving access to basic services, and creating open jobs. The author also emphasizes the importance of the strategic role of government and society in minimizing discrimination, complementing each other, reducing inequality, and ensuring sustainability.

Kata Kunci: Kesenjangan Sosial; Ketimpangan Ekonomi; Pancasila; Keadilan Sosial; Implementasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang dengan keragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi dibalik itu semua, NKRI dihadapkan pada tantangan besar berupa kesenjangan sosial yang semakin menganga. Kesenjangan ini, yang ditandai oleh perbedaan signifikan dalam akses terhadap sumber daya, peluang ekonomi, dan distribusi keuntungan antar kelompok masyarakat, merupakan masalah serius yang mengancam stabilitas dan kemajuan bangsa. Meskipun Pancasila, sebagai dasar negara, secara eksplisit menetapkan keadilan sosial sebagai cita-cita luhur—terutama dalam Sila Kelima—dan pemerintah telah berupaya mengatasi kesenjangan melalui berbagai kebijakan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar. Perbedaan distribusi sumber daya alam, kebijakan publik yang belum sepenuhnya berkeadilan, dan dampak globalisasi yang tidak merata turut memperburuk kondisi ini, berujung pada peningkatan angka pengangguran, kemiskinan, dan bahkan kriminalitas.

Sehingga menuntut kolaborasi yang intensif dari pihak pemerintah, swasta, dan juga masyarakat itu sendiri, untuk bisa merumuskan serta mengintegrasikan

kebijakan reformasi struktural yang komprehensif, mulai dari meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pelatihan keterampilan, perbaikan sistem distribusi SDA, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan. Sehingga pada akhirnya terciptalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan ketimpangan sosial dan terwujudnya stabilitas nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kelima, dalam konteks kenyataan kesenjangan sosial di Indonesia, serta mencari solusi untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah ketimpangan ekonomi yang semakin kompleks. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dan berkeadilan dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dimana merupakan penembangan dari teori yang sudah ada sebelumnya menjadi sebuah tulisan (Nasution, 2023). Metode ini

digunakan juga untuk menganalisis perkembangan dan relevansi Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dengan landasan bhinneka tunggal ika.

Penelitian ini tidak melibatkan data primer dengan melakukan observasi langsung ke lapangan, karena pada dasarnya tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis fenomena yang relevan terhadap dasar negara Pancasila dan mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya, serta mengutarakan hasil yang sudah dianalisis lewat kajian pustaka.

Pengumpulan data digunakan melalui studi pustaka dari berbagai referensi yang relevan dengan teori yang digunakan seperti jurnal maupun buku sebagai rujukan, pengumpulan data dilakukan untuk memastikan kebenaran narasi yang tertulis dan memperkuat teori serta analisis yang dituangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila merupakan sebuah falsafah yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang didalamnya terdiri dari berbagai ideologi, berbagai fenomena telah menyelimuti pergejolan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia salah satunya ialah kesenjangan sosial. Seringkali ketimpangan sosial ekonomi menghadirkan

ketidakadilan ditengah kondisi yang sedang terjadi hadirnya Pancasila telah mencerminkan nilai-nilai universal didalamnya yang salah satunya ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana keadilan sosial merupakan sebuah seruan untuk tidak menciptakan ketimpangan ekonomi maupun kesenjangan sosial pada masyarakat Indonesia.

Adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi dapat berdampak kepada terhambatnya mobilitas sosial dimana individu yang memiliki latar belakang ekonomi menengah kebawah kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup hal ini tentu berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara (Dinata, 2021).

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi perlunya memastikan setiap warga mendapat kesempatan yang sama dalam berbagai aspek sebagai perwujudan dari sila ke 5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut perlunya ada kebijakan yang berfokus kepada pemerataan distribusi dan pendapatan dan peningkatan akses sebagai layanan dasar. Peningkatan kualitas Pendidikan, perluasan layanan akses yang krusial seperti Kesehatan, dan menciptakan lapangan kerja terbuka

merupakan sebuah langkah awal dalam menganggulangi ketimpangan ekonomi (Putri, 2023).

Pancasila merupakan pedoman yang harus dipegang oleh bangsa Indonesia karena sejatinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber ketika terjadi sebuah ketimpangan nilai-nilai universal Pancasila berdiri sebagai penengah di tengah ketimpangan yang terjadi. Ketimpangan ekonomi dapat berujung kepada konflik sosial pengangan nya bertujuan untuk memelihara stabilitas negara, Pancasila dapat hadir dalam kondisi yang demikian (Yulianti, 2022).

Indonesia merupakan negara yang telah menghadapi situasi ketimpangan ekonomi di era globalisasi yang telah memberi dampak kompleks melalui pertumbuhan produksi yang tidak merata dan perpindahan sumber daya internasional yang diperparah dengan adanya intervensi bahkan ancaman embargo oleh pihak asing, keadaan ini semakin memperparah fenomena kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia (M Dwi Nurrohim, 2024).

Selain SDA, SDM diperlukan untuk mendorong majunya suatu negara dan mengurangi fenomena kesenjangan yang terjadi di masyarakat, Indonesia merupakan

negara yang kaya akan SDA, namun kurangnya potensi yang dimiliki oleh sebagian masyarakat negara masih sulit untuk bertransformasi, pada faktanya kebanyakan negara maju tidak hanya bergantung kepada SDA yang dimiliki dengan potensi SDM yang unggul dapat merubah negara tersebut menjadi negara yang berpotensi di kancah internasional.

Keadilan sosial sebagai butir dari Pancasila harus dapat di implementasikan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia baik itu pemerintah maupun rakyat dengan bersikap inklusif, untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi penting untuk memastikan tindakan yang dilakukan berkelanjutan dan sesuai dengan apa yang dituangkan didalam isi sila ke 5 pancasila serta mempertimbangkan efeknya pada masyarakat dan lingkungan (Prodi, 2017).

Melihat fenomena yang terjadi dan seolah menekan masyarakat Indonesia pemerintah dapat mengimplementasikan keadilan sosial dengan melindungi hak bagi seluruh individu dan memberikan kesempatan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menunjang keseimbangan sosial seperti membuka lapangan pekerjaan, akses Pendidikan dan Kesehatan, serta melakukan program yang strategis bagi masyarakat

seperti program bantuan sosial sebagai pendukung untuk arah yang lebih baik. Keadilan sosial sebagai butir dari Pancasila pula mengamanatkan secara tidak langsung yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang sama tanpa memandang status juga harus sama dihadapan hukum untuk meminimalisir ketimpangan dan fenomena sosial yang dirasa menitikberatkan masyarakat (Nugraha, 2021).

Pancasila merupakan sebuah landasan yang memiliki nilai fundamental dalam mengatasi dan penengah pada fenomena sosial maupun ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, pada dasarnya Pancasila mengandung nilai-nilai persatuan, kerukunan, dan keadilan di tengah masyarakat.

Sila ke 5 pancasila bukan sekedar perkataan belaka, namun implementasi nya harus jelas pada dasarnya Pancasila merupakan falsafah yang memiliki tujuan dan arah bagi bangsa ini, fenomena ketimpangan sosial dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang dan memberi resolusi lewat perwujudan keadilan sosial yang inklusif, untuk dapat

mewujudkannya perlunya ada kolaborasi yang sinergis antara pemerintah maupun masyarakat sipil pada umumnya. Kedua

CONCLUSION

Pancasila, sebagai dasar negara, memiliki peran krusial dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah ketimpangan ekonomi yang semakin kompleks di Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kelima, menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi yang intensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang terbuka merupakan langkah penting untuk meratakan kesempatan dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia masih banyak. Faktor-faktor seperti globalisasi yang tidak merata, intervensi asing, dan kurangnya sumber daya manusia berkualitas menjadi penghambat utama. Dengan komitmen bersama, optimisme, dan upaya yang terstruktur, kita dapat mengatasi kesenjangan sosial dan mewujudkan cita-cita luhur Pancasila, yaitu masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Dinata, M. P. (2021, April 07). DJKN.

Retrieved from https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kp_knlhokseumawe/baca-artikel/13833/Menakar-Keadilan-Sosial-di-Masa-Pandemi.html:
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kp_knl-lhokseumawe/baca-artikel/13833/Menakar-Keadilan-Sosial-di-Masa-Pandemi.html

M Dwi Nurrohim, M. S. (2024). Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1-7.

Muhammad Iqbal, Simanjuntak, J. V., Purba, M. B., Ramadhani, N., Manullang, R. C. P., & Pasaribu, T. N. (2025). Ketika Pancasila dihadapkan dengan berbagai Kesenjangan sosial: Mencari Keadilan Sosial di Tengah Ketimpangan Ekonomi. *EDUKASI KULTURA JURNAL BAHASA SASTRA DAN BUDAYA*, 12(1), 378–384. <https://doi.org/10.24114/edukasikultura.v12i1.67753>

Nasution, A. F. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.

Bandung: Harfa Creative.

Nugraha, A. d. (2021). Pancasila sebagai Dasar Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial : Tantangan dan

Peluang. *Jurnal Penelitian Hukum*, 64-79.

Prodi, J. (2017). PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI INDONESIA. *JURMAFIS Jumadi*.

Putri, D. F. (2023). PROBLEMATIKA KETIMPANGAN EKONOMI DALAM SISTEM EKONOMI DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*.

Widjaja, M. (2021). *Pancasila dan Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Yulianti, R. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila Terhadap Konflik di Indonesia. *Jurnal Uns*, 97-104.